

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah daerah perlu menyadari bahwa kebutuhan pokok yang merupakan hak primer masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, air bersih, dan listrik yang masih belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk proyek-proyek yang diutamakan sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat (Bupati Bulungan, 2015). Era reformasi merupakan salah satu percepatan era dengan adanya penerapan kebijakan fiskal dan desentralisasi fiskal yang cukup tinggi, hal ini berdampak terhadap pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien dapat dilihat berdasarkan kinerja pemerintah daerah dalam memilih tata letak dan sistem akuntansi yang baik dalam pengelolaan anggaran.

Kinerja pemerintah yang baik didasarkan pada parameter pengambilan keputusan yang cermat, tepat dan teliti, hal ini dapat berdampak terhadap sistem pemerintahan yang akuntabel dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran. Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1999 pemerintah daerah merupakan lembaga yang memiliki peranan dan kewenangan yang sangat besar dalam pengelolaan keuangan atau anggaran dengan tujuan untuk memberikan tingkat transparansi dan akuntabilitas publik yang sangat tinggi terkait keuangan. (Kepri.kemenag.go.id, n.d.) Transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah yang kurang baik dapat berdampak terhadap kerugian negara dan

masyarakat yang terlibat. Korupsi merupakan salah satu contoh tindakan yang mencerminkan pengelolaan keuangan pemerintah yang kurang efektif.

Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat memberikan penilaian ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang kurang efektif dan efisien oleh menjelaskan bahwa pengelolaan tersebut berorientasi terhadap pemerintah daerah dan untuk kepentingan masing-masing pihak yang terlibat. Sedangkan dalam prinsip otonomi daerah yaitu pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah harus bersifat akuntabel dan transparan dengan tujuan untuk mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan berbagai pihak yang tidak terlibat dan tetap menjunjung tinggi asas pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia (Kepri.kemenag.go.id, n.d.).

Organisasi sektor publik merupakan salah satu contoh organisasi yang menuntut adanya tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Menurut (Moh. Mahsun, S.E., M.Si Ak., CA, CPA, 2019), Organisasi sektor publik adalah organisasi terkait kepentingan umum serta penyediaan barang dan jasa dengan sistem pembayaran pajak yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku. Pencapaian tujuan organisasi sektor publik membutuhkan kerjasama dengan pemerintah daerah guna meningkatkan kenyamanan, efektifitas dan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban seseorang atau kelompok yang ditugaskan untuk melakukan tugas tertentu kepada pihak yang memberikan amanat, baik dalam hierarki maupun antar rekan sejawat.

(Prof. DR. H. A. Rusdiana, M.M., Drs. Nasihudin, 2021) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan serta penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala.

Pertanggungjawaban ini mencakup penguasaan dan penggunaan dana yang dipercayakan untuk dikelola kepada pihak tertentu (Puspitawati & Effendy, 2021). Selain disampaikan melalui laporan keuangan, efektivitas akuntabilitas juga bergantung pada ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait laporan keuangan. Sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pemerintah, masyarakat berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas.

Jakarta Selatan merupakan bagian dari wilayah administratif Kota/Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta yang terletak di sebelah selatan daratan Jakarta. Pada tahun 2021, Jakarta Selatan memiliki populasi sebanyak 1.191.213 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 16.865,17 jiwa/km<sup>2</sup>. Wilayah Jakarta Selatan berada di antara 106°22'42" sampai 106°58'18" Bujur Timur (BT) dan 5°19'12" Lintang Selatan (LS) dengan luas sebesar 141,37 km<sup>2</sup> atau menyumbang sekitar 21,29% dari total luas wilayah Provinsi DKI Jakarta. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki 10 (sepuluh) kecamatan dan 65 (enam puluh lima) kelurahan diantaranya ; Kecamatan Jagakarsa dengan luas 24,87 km<sup>2</sup> memiliki 6 kelurahan, Kecamatan Kebayoran Baru dengan luas 12,93 km<sup>2</sup> memiliki 10 kelurahan, Kecamatan

Kebayoran Lama dengan luas 16,72 km<sup>2</sup> memiliki 6 kelurahan, Kecamatan Mampang Prapatan dengan luas 7,73 km<sup>2</sup> memiliki 5 kelurahan, Kecamatan Pancoran memiliki dengan luas 8,53 km<sup>2</sup> memiliki 6 kelurahan, Kecamatan Pasar minggu dengan luas 21,69 km<sup>2</sup> memiliki 7 kelurahan, Kecamatan Pesanggrahan memiliki dengan luas 12,76 km<sup>2</sup> memiliki 5 kelurahan, Kecamatan Setiabudi dengan luas 8,85 km<sup>2</sup> memiliki 8 kelurahan, Kecamatan Tebet dengan luas 9,03 km<sup>2</sup> memiliki 7 kelurahan. Kecamatan Cilandak sendiri dengan luas 12,93 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 5 kelurahan diantaranya ; Cipete Selatan, Gandaria Selatan, Lebak Bulus dan Pondok Labu (Jakarta.go.id, 2023).

**Tabel I.1**  
**Rincian APBD berdasarkan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan**  
**Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 – 2023**

<b>Keterangan</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Total 2023</b>
Pendapatan Daerah	77.448.713.889.500	74.380.646.088.137
Total Surplus Belanja Daerah	1.691.479.091.166	(233.117.291.119)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	5.022.420.964.799	9.400.439.814.055
Pembiayaan Netto	(1.691.479.091.166)	233.117.291.119
<b>Total APBD</b>	<b>82.471.134.854.299</b>	<b>83.781.085.902.192</b>

Sumber : *Smart Planning Budgeting* Pemprov DKI Jakarta

**Tabel I.2**  
**Rincian Alokasi Dana Se-Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun**  
**Anggaran 2023**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>
Jumlah Wilayah	5	5
Jumlah Kecamatan	44	44
Jumlah Kelurahan	267	267
Dana Bagi Hasil	13.628.309.306	15.307.479.799
Dana Alokasi Umum	-	22.179.718
Dana Alokasi Khusus Fisik	-	4.168.977
Dana Alokasi Non Fisik	-	3.123.410.476
Hibah ke Daerah	-	485.870.00
<b>Total</b>	<b>13.628.309.306</b>	<b>18.943.108.970</b>

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Berdasarkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dana yang diterima Se-Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2022 sebesar Rp 13.628.309.306 dan di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 18.943.108.970. Untuk dana alokasi umum, dana alokasi fisik dan dana alokasi non fisik di tahun 2022 tidak tertulis nominal di rincian transfer ke daerah dan dana desa. Untuk anggaran di tahun 2023 ; dana bagi hasil sebesar Rp 15.307.479.799, dana alokasi umum sebesar Rp 22.179.718, dana alokasi khusus fisik sebesar Rp 4.168.977, dana alokasi non fisik Rp 3.123.410.476 dan untuk hibah ke daerah sebesar Rp 485.870.00. Dana tersebut tersebar untuk wilayah se-Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023).

Pentingnya pengelolaan alokasi dana tersebut untuk kepentingan masyarakat yang mencapai Rp 13.628.309.306 di tahun 2022 dan Rp 18.943.108.970 di tahun 2023, peran pemerintah daerah harus kuat agar pertanggungjawaban tersebut bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dengan pengelolaan alokasi dana yang transparan membuat masyarakat mengetahui jumlah dana serta penggunaannya dan untuk menghindari kecurangan serta pendapat negatif dari masyarakat. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu alat ukur penilaian kinerja.

Parameter penilaian anggaran belanja dan pendapatan daerah yang baik dilihat berdasarkan *Value For Money* dengan beberapa kriteria yaitu efisiensi, efektivitas dan ekonomi. Menurut (Intan Setyaningrum, 2023) *value for money* adalah sebuah konsep organisasi publik yang bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja lembaga pengelolaan keuangan.

Sektor publik merupakan satu-satunya sasaran utama yang mencerminkan pengelolaan anggaran atau keuangan yang kurang efektif, hal ini dapat dilihat berdasarkan adanya pemborosan dan kerugian terhadap institusi atau lembaga tertentu. Pengukuran performa kinerja diperlukan untuk dapat menilai tanggung jawab pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik dalam memanfaatkan keuangan daerah, diukur dengan beberapa rasio keuangan daerah, rasio efektivitas untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pendapatan daerah dari anggaran yang tersedia, serta rasio efisiensi dan ekonomis guna membandingkan besaran pendapatan daerah dan belanja daerah. (Intan Setyaningrum, 2023). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN dan diberikan

kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mendukung pembiayaan kebutuhan daerah dalam konteks pelaksanaan desentralisasi. DAU ini diberikan dalam bentuk block grant, yang berarti penggunaannya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Dana alokasi umum diberikan berdasarkan aturan alokasi dasar dan celah fiskal dengan proporsi 10% terhadap pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta 90% secara nasional. (berkas.dpr.go.id, n.d.). Pemerintah telah mengalokasikan dana khusus untuk pembangunan dengan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperkuat pemerintahan, pembangunan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Namun, dalam pengelolaan dana masih terdapat kendala yang dapat menyebabkan pengelolaan dana yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

**Tabel I.3**  
**Rincian APBD Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2022 – 2023**

Nama Kelurahan	Jumlah Belanja
Kelurahan Lebak Bulus	10.973.680.339
Kelurahan Pondok Labu	12.577.465.362
Kelurahan Cilandak Barat	13.064.388.103
Kelurahan Cipete Selatan	9.912.757.714
Kelurahan Gandaria Selatan	8.357.127.172
<b>Total</b>	<b>54.885.418.690</b>

Sumber : Lampiran II Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta Nomor 5 Tahun 2022

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan dana adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan alokasi dana. Transparansi mengacu pada keterbukaan mengenai semua kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Melalui penyediaan informasi yang mudah dan akurat, prinsip transparansi membangun kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah, diperlukan transparansi dalam pengelolaan dana.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan dana adalah pemerintah daerah dinilai masih belum bisa mengatasi beberapa permasalahan seperti ; banjir, kemacetan, polusi udara, ketersediaan air bersih. Kualitas udara di kelurahan wilayah Kecamatan Cilandak memiliki tingkat polusi yang serupa, sementara mutu air di Kelurahan Cipete Selatan dinilai buruk, sehingga memerlukan penanganan (Halimah Nurhasanah & Sri Hidayati Djoeffan, 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan alokasi dana, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pembangunan, memberikan pemahaman kepada masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, melakukan pengawasan penggunaan dana secara langsung dari pemerintah dan

bagaimana kinerjanya berjalan serta memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Penelitian tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti antara lain oleh Lailatus Sa'adah dan Moh. Syadel yang meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan pengaruhnya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat melalui kualitas pelayanan (Studi Pada Desa-desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang) tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak akuntabilitas dan transparansi sebagai faktor-faktor independen terhadap tingkat kepercayaan masyarakat sebagai variabel terikat, dengan mempertimbangkan kualitas layanan sebagai variabel penghubung. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel bebas dan terikat. Penelitian ini dilakukan di beberapa desa di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur (Lailatus Sa'adah, 2021).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang didasarkan pada waktu dan tempat penelitian yaitu terletak di Kantor Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. Ketertarikan peneliti untuk memilih topik yang berkaitan dengan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Terhadap Kinerja Pemerintah di Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan Tahun 2022-2023 karena peneliti ingin mengetahui apakah kinerja pemerintah daerah atas transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan sudah berjalan baik.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**“ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN CILANDAK KOTA JAKARTA SELATAN”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya identifikasi masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Masalah-masalah ini akan menjadi fokus utama dan menjadi batasan dalam penelitian ini. Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana transparansi dalam pengelolaan alokasi dana di Kecamatan Cilandak kota Jakarta Selatan Tahun 2022 – 2023?
2. Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana di Kecamatan Cilandak kota Jakarta Selatan Tahun 2022 – 2023?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi dari permasalahan-permasalahan sebelumnya, diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Memahami, mengidentifikasi serta mendeskripsikan sistem Transparansi pengelolaan dana di Kecamatan Cilandak kota Jakarta Selatan Tahun 2022 - 2023
2. Memahami, mengidentifikasi serta mendeskripsikan sistem Akuntabilitas pengelolaan dana di Kecamatan Cilandak kota Jakarta Selatan Tahun 2022 – 2023.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari dilakukannya penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna seperti :

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terkait Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kecamatan Cilandak kota Jakarta Selatan.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Pemerintah Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan

Hasil dari adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk mengukur dan membantu pemerintah menerapkan sistem yang transparan, akuntabel dan dapat bertanggung jawab sehingga dipercaya masyarakat.

###### b. Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat akan dapat memantau secara langsung para penerima dana pemerintah dan bagaimana kinerjanya berjalan. Selain itu, pemerintah yang transparan akan membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan laporan pertanggungjawaban pemerintah dalam bentuk laporan keuangan. Jika pemerintah transparan, maka masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam pemerintahan sebagai pengontrol dan pengawas. Peran masyarakat akan mampu mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab.

c. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan yang baru, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir lebih maju melalui penelitian ini, serta sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas MH Thamrin.

d. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran yang dapat dijadikan kajian lebih lanjut dalam penelitian – penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan.

**E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan disusun untuk memperjelas materi yang akan dibahas, yang dibagi ke dalam setiap bab untuk memberikan gambaran secara garis besar dari penulisan ini. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut :

**BAB I                   PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metodologi penulisan sistematis.

**BAB II                   TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini penjelasan seputar teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan, dengan mengacu pada buku-buku dan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. dan

rangkuman tinjauan pustaka/kerangka teori selanjutnya dikembangkan menjadi kerangka konsep/kerangka pemikiran, dimana pada kerangka pemikiran tergambar hubungan antar variabel dalam penelitian yang disusun berdasarkan landasan teori di tinjauan pustaka. Selanjutnya pada bagian akhir memuat hipotesis yang menggambarkan tujuan dari penelitian.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai tempat dan waktu penelitian, metode penelitian yang digunakan, subyek penelitian yang menentukan populasi penelitian, sampel penelitian yang mengulas tentang besar sampel dan teknik sampling (pengumpulan data). Instrumen penelitian yakni berupa alat dan bahan penelitian serta cara kerja. Selanjutnya pada bagian akhir akan menjelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan (*participant observation*), wawancara mendalam (*in-depth interview*), serta penggunaan dokumentasi.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari pengambilan data penelitian, hasil dari analisis data penelitian, hasil dari pengujian hipotesis serta pembahasan hasil pengolahan data penelitian dan pengujian hipotesis.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan akan dipaparkan beserta saran-saran terhadap kesimpulan tersebut.